



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P - RENJA) BKPSDMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka dapat diterbitkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rencana satu tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya Perubahan RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini, maka BKPSDMD telah mempunyai rencana rinci dan telah dijabarkan dengan skala prioritas dan sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2024 - 2026.

Untuk selanjutnya RENJA Perubahan diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RENJA Perubahan diharapkan menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana tahun ke depan.

Sungailiat, 05 Juni 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDMD
KAB. BANGKA



Hj. R. TATI RAENINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 196802211996032002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum		2
1.3. Maksud dan Tujuan		4
1.4. Sistematika Penulisan		5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I BERKENAAN		6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		16
BAB IV. PENUTUP		42
LAMPIRAN	<ul style="list-style-type: none">• SK TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025• TIME SCHEDULE PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025• TABEL VERIFIKASI SASARAN STAREGIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara dan manajemen kepegawaian merupakan serangkaian arah dan tujuan dari tercapainya profesionalisme ASN. Kualitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara perlu ditingkatkan dengan peningkatan kompetensi secara manajerial, struktural dan teknis serta untuk regenerasi aparatur dilakukan rekrutmen secara terbuka melalui sistem CAT (Computer Assited Test) dan untuk rotasi/ mutasi kepegawaian menggunakan metode assesment rekrutmen bagi jenjang struktural. Pembinaan ASN menunjang terciptanya kedisiplinan dan optimalisasi pelayanan kepegawaian berbasis kualitas sesuai Standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Indikator pelaksanaan pencapaian ini perlu dituangkan dalam Rencana kerja yang dirumuskan pada akhir tahun sebelumnya untuk menjadi patokan arah dan target pencapaian tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah dalam tahun berkenaan yang sebagaimana disusun berdasarkan perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan perubahan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdiri atas Perumusan Rancangan perubahan Renja Perangkat dan penyajian rancangan perubahan Renja perangkat daerah.

Perumusan rancangan perubahan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup analisi gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut, BKPSDMD Kabupaten Bangka menyusun Program, Kegiatan dan subkegiatan melalui Perubahan Rencana Kerja yang mendukung terwujudnya misi dimaksud. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan, maka diharapkan seluruhnya kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di BKPSDMD Kabupaten Bangka

memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dicapai dan dinilai keberhasilannya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada perubahan anggaran Kabupaten Bangka Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Bangka secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran maupun prioritas dan platform perubahan anggaran

(KUPA- PPAS) Tahun 2025 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (R-APBD) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

- SK BUPATI TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA BKPSDMD TAHUN 2025
- TIME SCHEDULE PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025
- TABEL VERIFIKASI SASARAN STRATEGIS

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. Menindaklanjuti hal itu, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 pun harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD
- b. Konsisten dengan Rencana Strategis
- c. Program kegiatan yang diutamakan
- d. Masalah yang ada dan perlu diatasi
- e. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (Tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub kegiatan .secara rinci capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Adapun program-program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 tersebut sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari Kegiatan

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Kepagwaian Daerah.

Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan , yakni:

- **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**, Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan :
 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
- **Mutasi dan Promosi ASN**, Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan :
 - Pengelolaan Promosi ASN
- **Pengembangan Kompetensi ASN**, Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan :
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan :
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yakni :

- **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**, Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka), sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

Dituangkannya kegiatan dan sub kegiatan di dalam Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka. Dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja/tingkat keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka. Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan I 2025 sebagian besar memiliki tingkat pencapaian di bawah 100%.

Hal ini dikarenakan pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sampai dengan triwulan I 2025 (paruh pertama tahun anggaran), dan diharapkan pencapaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada triwulan berikutnya dan mencapai target hingga akhir tahun anggaran Untuk kegiatan rutin, realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan serta subkegiatan telah sesuai dengan anggaran kas, dimana untuk beberapa kegiatan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Sementara itu, realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan serta sub kegiatan prioritas sebagian besar telah sesuai dengan anggaran kas. Beberapa kegiatan yang belum terealisasi disebabkan karena penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) yang masih berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 3 (tiga) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 16 (enam belas) sub kegiatan.

Alokasi dana tahun 2025 untuk Belanja sebesar Rp. 8.843.306.348,00 terealisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp 2.155.493.718,00 atau 24,37 persen. Capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	Program	Realisasi			
		Kinerja	Kategori*)	Keuangan	Kategori*)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,64 %	SR	28,52%	SR
2	Kepegawaian Daerah	0.00%	SR	9,13%	SR
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00%	SR	0.00%	SR

Keterangan kategori *)		
Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Pada tabel diatas terlihat skema rendahnya capaian kinerja pada periode kinerja pada triwulan ke – I Tahun anggaran 2025 dan langkah – langkah konkret percepatan pemenuhan kinerja atas program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi atas kinerja yang masih rendah yakni nilai 9,64% dengan indikator Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah dan indikator Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah dinilai pada akhir periode Tahun 2025. Realisasi kinerja Sub kegiatan didominasi pengeluaran belanja yang bersifat rutin seperti pembayaran tagihan listrik, PDAM dan internet sehingga anggaran yang dikeluarkan pun masih sangat rendah yakni 28,52% dengan kategori sangat rendah.

Upaya pencapaian atas target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Pemenuhan data dan kelengkapan dokumen yang terdokumentasi melalui tahapan evaluasi dan monitoring pada setiap output sub kegiatan dan target kinerja.

2. Program Kepegawaian Daerah

Capaian kinerja atas Program Kepegawaian Daerah yakni 0,00% dengan kategori sangat rendah disebabkan beberapa sub kegiatan teknis seperti penilaian e-kinerja dan serapan atas sistem informasi kepegawaian direncanakan pengerjaannya pada triwulan ke- II sehingga output yang diperoleh dicapai pada akhir Tahun anggaran 2025. Realisasi anggaran untuk program ini pun masih dalam kategori sangat rendah yakni 9,13%.

Upaya pencapaian atas target Program Kepegawaian Daerah meliputi Penambahan anggaran kegiatan seba

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi sub kegiatan teknis pengembangan kompetensi pada Tahun 2025 masih dalam kategori sangat rendah pada triwulan ke-I pada Tahun 2025 yakni dengan nilai 0,00% disebabkan fasilitasi pelaksanaan masa orientasi PPPK secara daring masih menunggu kesiapan narasumber dari pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan masih menunggu ketersediaan kuota dari pihak penyelenggara seperti Badan Diklat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dari Pemerintah Kabupaten / kota yang berkerjasama

dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka sehingga pelaksanaan kegiatan terjadwal pada triwulan ke-II dan Ke- IV Tahun anggaran 2025. Anggaran yang terealisasi pun berimbang dalam kategori sangat rendah dengan nilai 0,00%.

Berikut dapat dilihat secara terperinci dalam tabel 2.2 evaluasi hasil renja sampai dengan Tahun 2025 pada triwulan ke-I yang disandingkan dengan target capaian RKPD.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kabupaten Bangka terdiri 3 (Tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 38 (Tiga puluh delapan) Sub Kegiatan. Perubahan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan secara teknis terhadap pelayanan dan manajemen kepegawaian terutama di Pemerintah Kabupaten Bangka. Penambahan anggaran menjadi modal utama selain peraturan yang menjadi patokan pelaksanaan kegiatan sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan. Untuk selengkapnya program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.1

REKAPITULASI PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN TOTAL PAGU INDIKATIF

No.	Uraian	Renja PD 2025	APBD 2025	Perubahan Renja PD 2025	Bertambah/ Berkurang (5 - 3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program	3	3	3	0
2	Kegiatan	12	12	12	0
3	Sub Kegiatan	58	58	38	-20
4	Output Kegiatan	58	58	38	-20
5	Pagu Anggaran	10.686.740.600	8.154.597.586	8.843.306.348	(1.843.434.252)

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tidak mengalami perubahan untuk program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025. Namun mengalami perubahan jumlah sub kegiatan dari 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan menjadi 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Pagu anggaran pada APBD 2025 sebesar Rp 8.154.597.586,00 menjadi setelah perubahan Rp 8.843.306.348. Namun pada Renja perangkat daerah di RKPDP Tahun 2025 anggaran sebesar Rp 10.686.740.600,00 sehingga selisih dengan anggaran pada Perubahan Renja 2025 adalah sebesar Rp 1.843.434.252,00 . Hal ini disebabkan adanya efisiensi alokasi anggaran terhadap APBD di Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berikut rekapitulasi secara terperinci pada Tabel 3.2. Rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA				10.686.740.600,00	8.154.597.586,00	8.843.306.348,00	-1.843.434.252,00						
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.686.740.600,00	8.154.597.586,00	8.843.306.348,00	-1.843.434.252,00						
	5.03	KEPEGAWAIAN				10.242.967.160,00	7.591.750.846,00	8.320.359.608,00	-1.922.607.552,00						
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan perangkat daerah	24,50 nilai	25,00 nilai	8.484.483.592,00	6.787.849.946,00	7.496.996.241,00	-987.487.351,00						
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,23 nilai	12,23 nilai											
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0 persentase	0 persentase											
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	63,86 indeks	76,83 indeks											
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4 indeks	4 indeks											
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100 persentase	100 persentase											
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i> <i>Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar</i>	100 persentase 100 persentase	100 persentase 100 persentase	70.066.290,00	13.005.000,00	6.840.000,00	-63.226.290,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupa n.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWA IAN DAN PENGEMBA NGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen	8 Dokumen	46.567.290,00	6.585.000,00	2.710.000,00	-43.857.290,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	23.499.000,00	6.420.000,00	4.130.000,00	-19.369.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar</i>	100 persentase	100 persentase	6.516.795.082,00	6.118.875.433,00	6.884.301.158,00	367.506.076,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	231/29P Orang/bulan	58 Orang/bulan	6.437.045.082,00	6.118.875.433,00	6.884.301.158,00	447.256.076,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	42 Laporan	42 Laporan	41.250.000,00	0,00	0,00	-41.250.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Pegawai yang Menganakan Atribut Lengkap</i>	100 persentase	100 persentase	114.300.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-104.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	51.500.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	32.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase penambahan aset perangkat daerah</i>	4,41 persentase	4,41 persentase	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</i>	100 persentase	100 persentase	1.069.329.220,00	361.379.513,00	345.013.500,00	-724.315.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	164.800.000,00	44.965.260,00	42.715.404,00	-122.084.596,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara</i>	100 persentase	100 persentase	204.500.000,00	117.560.000,00	117.560.000,00	-86.940.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	APARATUR LINGKUP BKPSDMD KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	5{2R2/3R4} Unit	5{2R2/3R4} Unit	154.500.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	-67.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	70 Unit	70 Unit	35.000.000,00	30.560.000,00	30.560.000,00	-4.440.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Rencana kebutuhan ASN sesuai Peta Jabatan	100 persentase	100 persentase	1.758.483.568,00	803.900.900,00	823.363.367,00	-935.120.201,00						
			Persentase Pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN	15,37 persentase	15,37 persentase										
			Persentase Data Kepegawaian yang Up to Date, Akurat, Cepat, Tepat	100 persentase	100 persentase										
			Persentase Penempatan SDM sesuai Standar Kompetensi	72,00 persentase	72,00 persentase										
			Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS	0,41 persentase	0,41 persentase										
			Persentase Perangkat daerah Dengan Kinerja ASN Sesuai Ekspektasi	100 persentase	100 persentase										

			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin	100 persentase	100 persentase										
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		<i>Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sesuai NSPK</i>	100 persentase	100 persentase	365.923.568,00	87.400.000,00	159.630.300,00	-206.293.268,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
			<i>Persentase Terpenuhiya data dan informasi kepegawaian yang akurat</i>	100 persentase	100 persentase								Penguatan Kapasitas Birokrasi		
			<i>Persentase Mutasi dan Promosi ASN sesuai NSPK</i>	100 persentase	100 persentase								Penguatan Kapasitas Birokrasi		
			<i>Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi</i>	88,24 persentase	88,24 persentase										
			<i>Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang efektif sesuai ketentuan</i>	100 persentase	100 persentase										
			<i>Persentase ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin</i>	99,85 persentase	99,85 persentase										
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	30.900.000,00	0,00	82.160.000,00	51.260.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	161.983.568,00	0,00	0,00	-161.983.568,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN</i>	1 Laporan	1 Laporan	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	175 Dokumen	175 Dokumen	26.780.000,00	0,00	0,00	-26.780.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	35.020.000,00	0,00	0,00	-35.020.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	4020 Dokumen	4790 Dokumen	33.990.000,00	0,00	0,00	-33.990.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														

			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan</i>	4 Laporan	4 Laporan	36.050.000,00	87.400.000,00	77.470.300,00	41.420.300,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		<i>Persentase Mutasi dan Promosi ASN sesuai NSPK</i>	100 persentase	100 persentase	113.300.000,00	216.010.900,00	163.243.067,00	49.943.067,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	36.050.000,00	0,00	0,00	-36.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	500 Dokumen	500 Dokumen	36.050.000,00	0,00	0,00	-36.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	41.200.000,00	216.010.900,00	163.243.067,00	122.043.067,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		<i>Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Kebutuhan Organisasi</i>	88,24 persentase	88,24 persentase	1.055.750.000,00	500.490.000,00	500.490.000,00	-555.260.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														

			<i>Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	250(110L/140P) Orang	0 Orang	30.900.000,00	0,00	0,00	-30.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	15.450.000,00	0,00	0,00	-15.450.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>	6 Orang	5 Orang	669.500.000,00	500.490.000,00	500.490.000,00	-169.010.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	36.050.000,00	0,00	0,00	-36.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan</i>	200(100L/100P) Orang	0 Orang	30.900.000,00	0,00	0,00	-30.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN</i>	1 Laporan	0 Laporan	30.900.000,00	0,00	0,00	-30.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional														

			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional</i>	220(110L/110P) Orang	0 Orang	25.750.000,00	0,00	0,00	-25.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	36.050.000,00	0,00	0,00	-36.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN</i>	22(11L/11P) Orang	0 Orang	30.900.000,00	0,00	0,00	-30.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional</i>	1 Laporan	0 Laporan	25.750.000,00	0,00	0,00	-25.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	36.050.000,00	0,00	0,00	-36.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			<i>Jumlah ASN Fungsional yang Dibina</i>	100(60L/40 P) Orang	0 Orang	30.900.000,00	0,00	0,00	-30.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														

			<i>Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir</i>	22(12L/10P) Orang	0 Orang	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional</i>	1 Laporan	0 Laporan	36.050.000,00	0,00	0,00	-36.050.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		<i>Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang Efektif Sesuai Ketentuan</i>	100 persentase	100 persentase	223.510.000,00	0,00	0,00	-223.510.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	27.810.000,00	0,00	0,00	-27.810.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	1 Laporan	1 Laporan	25.750.000,00	0,00	0,00	-25.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>	15(10L/5P) Orang	0 Orang	25.750.000,00	0,00	0,00	-25.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>	350(250L/100P) Orang	350(250L/100P) Orang	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	25.750.000,00	0,00	0,00	-25.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>	250(110L/140P) Orang	4565(1566L/2999P) Orang	25.750.000,00	0,00	0,00	-25.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	1 Laporan	1 Laporan	25.750.000,00	0,00	0,00	-25.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN</i>	1 Laporan	1 Laporan	25.750.000,00	0,00	0,00	-25.750.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					443.773.440,00	562.846.740,00	522.946.740,00	79.173.300,00						
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	30 nilai	30 nilai	443.773.440,00	562.846.740,00	522.946.740,00	79.173.300,00						

5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>persentase ASN yang memperoleh sertifikasi diklat teknis</i>	15,00 persentase	15,00 persentase	257.500.000,00	0,00	0,00	-257.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
		<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>	200(100/100P) Orang	0 Orang	257.500.000,00	0,00	0,00	-257.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional</i>	9,47 persentase	9,47 persentase	186.273.440,00	562.846.740,00	522.946.740,00	336.673.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN KAB. BANGKA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota													
		<i>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota</i>	110(55/55P) Orang	0 Orang	30.900.000,00	0,00	0,00	-30.900.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Kapasitas Birokrasi		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 secara umum memuat Perubahan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 serta sebagai bentuk evaluasi perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2025.

4.1. Catatan Penting yang Perlu di Perhatikan

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

- a. Masih minimnya kuantitas aparatur yang kompeten di Kabupaten Bangka dalam kompetensi teknis dan manajerial.
- b. Perlunya pemahaman yang sama dalam pelaksanaan core value “ BERAKHLAK” dalam mendukung kinerja pemerintah dalam layanan kepegawaian dan sumber daya manusia.
- c. Perlunya penerapan Sistem Merit agar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka menjadi profesional dan berintegritas, menempatkan ASN sesuai kompetensi, optimalisasi dalam peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN , serta memberikan kepastian karier dan penghargaan yang layak.
- d. Masih kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan sasaran kinerja individu terkait mengikuti perubahan terbaru dari pemerintah pusat.
- e. Data dan informasi yang masih sangat minim dan manual untuk mendukung laporan yang disampaikan.
- f. Perlu adanya inovasi dan kecepatan akses *digital* dalam penyampaian rencana kebutuhan kegiatan dari bidang dalam BKPSDMD Kabupaten Bangka dan penyaluran informasi secara akurat dan akuntabel .
- g. Belum adanya gedung diklat yang representatif untuk diklat pegawai di Kabupaten Bangka, sehingga terkendala dalam penyusunan Program dan Kegiatan Diklat yang cenderung memerlukan anggaran yang lebih besar untuk pengiriman peserta diklat keluar Pemkab Bangka.

4.2. Kaidah Pelaksanaan.

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka harus tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan.

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja perencanaan pembangunan :

- Peningkatan kuantitas aparatur yang kompeten melalui seleksi penerimaan CPNSD dan PPPK dan memfasilitasi peningkatan kompetensi manajerial dan teknis bagi ASN di Pemkab.Bangka.
- Secara komperhensif melakukan dialog kinerja untuk menujung pencapain core value "BERAKHLAK"
- Peningkatan/Rehab Berat Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka
- Pembangunan gedung diklat dan Sarana CAT (Computer assested) bagi peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Pembangunan gedung arsip BKPSDMD untuk penyimpanan tata naskah ASN Kabupaten Bangka.
- Peningkatan ketersediaan dan akses data dan informasi yang *valid* dan *up to date*
- Penguatan kembali koordinasi antar bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka untuk sinergitas pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disampaikan sebagai bahan perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025, sehingga perencanaan di BKPSDMD Kabupaten Bangka terlaksana secara sistematis dan terintegrasi dalam Visi Misi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 05 Juni 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDMD KAB.BANGKA



Hj. R. TATI RAEMINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 196802211996032002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl . A. Yani jalur II Sungailiat Kode Pos 33215 Telepon 0717-92414 Fax 0717-92414

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.3/34/BKPSDMD/2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN
2025 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Penetapan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);

20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 21 April 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KAB. BANGKA,**



**R. TATI RAENINGSIH
Pembina Tk. I**

NIP 19680221 199603 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka

Nomor : 100.3.3/34/BKPSDMD/2025

Tanggal : 21 April 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Ket
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab	--
2.	Sekretaris	Ketua	--
3.	Kabid. Mutasi Kepegawaian	Anggota	--
4.	Kabid. Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota	--
5.	Kabid. Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota	--
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan	Anggota	--
7.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	--
8.	Pranata Komputer Terampil	Anggota	--
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat	Anggota	--

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KAB. BANGKA,**



R. TATI RAENINGSIH

Pembina Tk. I

NIP 19680221 199603 2 002

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Surat Sekda kepada Kepala PD Permintaan Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025/input Matriks Rancangan P-Renja ke SIPD	30 April 2025		Bappeda
2	Penyampaian Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 kepada Bappeda/ Input Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 ke SIPD	2 – 8 Mei 2025		Seluruh PD
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan P-Renja PD	9 Mei 2025		Bappeda
7	Penyusunan Rancangan P-Renja PD oleh Kepala PD	9 – 23 Mei 2025		Seluruh PD
8	Verifikasi Rancangan P-Renja PD (Matriks) oleh Bappeda	9 Mei 2025		Bappeda
17	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Tahun 2025	26 Mei 2025	Minggu ke-4 bulan Mei 2025	Bagian Hukum dan HAM Setda
18	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	26 Mei 2025		Bappeda
19	Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	27 Mei – 9 Juni 2025	Diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Seluruh PD
20	Penyampaian Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 ke Bappeda	10 Juni 2025		Seluruh PD
21	Verifikasi Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 oleh Bappeda	10 – 13 Juni 2025	Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bappeda
22	Penyusunan Ranperkada P-Renja PD Tahun 2025	16 Juni 2025		Bappeda
23	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	18 Juni 2025		Bappeda
24	Penetapan Perkada tentang P-Renja PD Tahun 2025	20 Juni 2025	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bagian Hukum dan HAM Setda

TABEL VERIFIKASI TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS , PROGRAM, DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD 2025
		<i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai</i>	<i>n/a</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
I	MENINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	<i>Hasil Evaluasi Akip Perangkat Daerah</i>	<i>BB</i>	<i>(BB) 73,66</i>	<i>BB (80,00)</i>	<i>BB (80,00)</i>	<i>BB (80,00)</i>
	<i>Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai</i>	<i>24,94</i>	<i>24,50</i>	<i>24,00</i>	<i>24,50</i>
		<i>Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai</i>	<i>11,11</i>	<i>12,23</i>	<i>12,23</i>	<i>12,23</i>
	<i>Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar</i>	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
		<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun</i>	<i>Nilai</i>	<i>8</i>	<i>8 Dokumen</i>	<i>8</i>	<i>8 Dokumen</i>
	<i>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Nilai</i>	<i>4</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>4</i>	<i>4 Dokumen</i>
	<i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI</i>	<i>Persen</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
	<i>Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100,00</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Orang/bulan</i>	<i>100,00</i>	<i>52 Orang/14 bulan Gaji (23 Laki-laki dan 29 Perempuan)</i>	<i>52 Orang/14 bulan Gaji (23 Laki-laki dan 29 Perempuan)</i>	<i>52 Orang/14 bulan Gaji (23 Laki-laki dan 29 Perempuan)</i>
	<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Dokumen</i>	<i>100,00</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>
	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Laporan</i>	<i>100,00</i>	<i>42 Laporan</i>	<i>42 Laporan</i>	<i>42 Laporan</i>

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD 2025
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai	100,00	63,86	63,86	63,86
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	Persen	100,00	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Persen	100,00	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	100,00	50%	50%	50%
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	1 Paket (Pakaian Olah Raga 50 Stel)	1 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel)	1 Paket (Pakaian Olah Raga 50 Stel)
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	20 Orang (10orang laki-laki, 10orang perempuan)	20 Orang (10orang laki-laki, 10orang perempuan)	0
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Nilai	3	4	4	4
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	Persen	50,00	100%	100%	100%
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12 Laporan	12	12 Laporan
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	12 Dokumen	12	12 Dokumen
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	12 Dokumen	12	12 Dokumen
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Persen	50,00	100%	100%	100%
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD 2025
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100%	100%	100%
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Persentase penambahan aset perangkat daerah	Persen	100,00	4,41%	4,41%	4,41%
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	15 Unit	15 Unit	15 Unit
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Persen	5.12	15%	15%	15%
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	2 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda empat	2 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda empat	2 unit Kendaraan Roda Dua, 3 Unit Kendaraan Roda empat
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	46.15	70 Unit	70 Unit	70 Unit
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2 Unit	2 Unit	0
		Indeks Profesionalitas ASN		76,73	65,21	65,21	65,21
II	MENINGKATNYA MANAJEMEN SDM DAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN YANG HANDAL	Persentase Aspek Manajemen SDM yang dikelola sesuai NSPK		72,00	73,00	73,00	73,00
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan disiplin	Persentase Rencana kebutuhan ASN' sesuai Peta Jabatan	Persen	70,00	100%	100%	100%
		Persentase pengadaan ASN sesuai dengan Rencana Kebutuhan ASN	Persen	100,00	15,37%	15,37%	15,37%
	Meningkatnya nilai NSPK dalam elemen mutasi dan promosi ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sesuai NSPK	Persen	100,00	100%	100%	100%
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	0	1 laporan	1 laporan	1 laporan

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD 2025
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Laporan	0	175 Dokumen	175 Dokumen	175 Dokumen
	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi , kinerja dan disiplin	Persentase Data Kepegawaian yang Up to date, Akurat, Cepat, Tepat	Persen	100,00	100%	100%	100%
	Terpenuhinya data dan informasi kepegawaian yang akurat	Persentase Terpenuhinya data dan informasi kepegawaian yang akurat	P	100,00	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	4000	4020 Dokumen	4020 Dokumen	4020 Dokumen
	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	4	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi , kinerja dan disiplin	Persentase Penempatan SDM sesuai Standar Kompetensi	Persen	70,00	72,00%	72,00%	72,00%
	Meningkatnya nilai NSPK dalam elemen mutasi dan promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN sesuai NSPK	Persen	40,00	100%	100%	100%
	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	0	1	1 dokumen	1
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	0	450 Dokumen	450 Dokumen	450 Dokumen
	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi , kinerja dan disiplin	Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan PNS	Persen	0.07	0,41	0,41	0,41
	Terpenuhinya perangkat daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Persen	60.30	88,24%	88,24%	88,24%
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	250 orang (L= 110 org P= 140 org)	250 orang (L= 110 org P= 140 org)	250 orang (L= 110 org P= 140 org)
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	orang	4	6 orang	6 orang	6 orang

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD 2025
	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang	0	200 orang (L= 100 orgP= 100 org)	200 orang (L= 100 orgP= 100 org)	200 orang (L= 100 orgP= 100 org)
	Terlaksananya evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	Laporan	0	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Tersusunnya Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	0	220 orang (L= 110 org dan P= 110 org)	220 orang (L= 110 org dan P= 110 org)	220 orang (L= 110 org dan P= 110 org)
	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang	0	22 orang (L= 12 org , P= 10 org)	22 orang (L= 12 org , P= 10 org)	22 orang (L= 12 org , P= 10 org)
	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	0	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	0	100 orang (L= 60 org P= 40 org)	100 orang (L= 50 org P= 50 org)	100 orang (L= 60 org P= 40 org)
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	0	22 orang (L= 12 org , P= 10 org)	22 orang (L= 12 org , P= 10 org)	22 orang (L= 12 org , P= 10 org)
	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Dokumen	0	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi , kinerja dan disiplin	Persentase Perangkat daerah Dengan Kinerja ASN Sesuai Ekspektasi	Persen	100,00	100%	100%	100%
	Tercapainya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang efektif sesuai ketentuan	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang efektif sesuai ketentuan	Persen	100,00	100%	100%	100%
	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	0	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Meningkatnya nilai dimensi kualifikasi , kinerja dan disiplin	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin	Persen	100,00	100%	100	100%

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD 2025
	Meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	Persen	99,85	95%	98%	98%
	Terlaksananya Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	0	98%	15 orang (L=10 org P=5 org)	15 orang (L=10 org P=5 org)
	Terlaksananya Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	0	15 orang (L=10 org P=5 org)	350 orang (L= 250 org P= 100 org)	350 orang (L= 250 org P= 100 org)
	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	0	350 orang (L= 250 org P= 100 org)	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	6	1 Dokumen	250 orang (L= 110 org P= 140 org)	250 orang (L= 110 org P= 140 org)
	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	0	250 orang (L= 110 org P= 140 org)	1 Laporan	1 Laporan
	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	0	1 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen
	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	0	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan
III	MENINGKATNYA SDM YANG BERKUALITAS	Persentase Perangkat Daerah dengan IP-ASN pada rentang nilai > 64	Persen	0	67,24	67,24	67,24
	Meningkatnya nilai dimensi kompetensi ASN	Nilai Dimensi Kompetensi ASN	Persen	26,10	30	30	30
	Meningkatnya nilai dimensi kompetensi diklat teknis	Persentase ASN yang memperoleh sertifikasi diklat teknis	Persen	0	91,63	91,63	91,63
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	0	200 orang (L= 100 orang; P= 100 org)	200 orang (L= 100 orang; P= 100 org)	200 orang (L= 100 orang; P= 100 org)
	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persen	100,00	9,47%	9,47%	9,47%
	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup Kabupaten/Kota	orang	100	110 org (L= 55 org P= 55 org)	110 org (L= 55 org P= 55 org)	110 org (L= 55 org P= 55 org)
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama antar lembaga	Dokumen	0	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024-2026	TARGET 2025 DI RENJA PD 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD 2025
	<i>Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan

Sungailiat, 22 Mei 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka



HIROTATI RAENINGSIH, S.H.
Pembina Tk.I / IV b
NIP 196802211996032002